

Faktor – Faktor Dampak Kebijakan Larangan Import Pada Penjualan Thrift Di Kota Tangerang

David Anthonyus¹, Suparman²

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM, Jakarta Indonesia

Email:davidmanihuruk14@gmail.com¹, suparmansasa19@gmail.com²,

Abstract.

This study aims to analyze the factors affecting the impact of the government's policy on banning the import of second-hand clothing on thrift business sales in Tangerang City. The import ban policy was implemented to protect the domestic garment industry and to safeguard public health. However, this policy has generated various consequences for thrift business actors who have long depended on imported second-hand clothing as their main source of supply. This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation studies. The informants consisted of government representatives, thrift business owners in Tangerang City, and academics with expertise in trade policy and micro-enterprises. Data analysis was conducted qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the import ban policy has resulted in economic impacts, including decreased income, limited product supply, and increased selling prices of thrift products. From a social perspective, the policy has influenced public perceptions of thrift businesses and altered consumer consumption patterns. Meanwhile, in terms of business operations, thrift entrepreneurs face reduced stock availability and limited product variety. To cope with these conditions, thrift business actors have implemented various adaptive strategies, such as product diversification, seeking alternative suppliers, and strengthening relationships with customers. However, these strategies remain defensive in nature and have not yet been fully effective in promoting optimal business development.

Keywords: Import Ban Policy, Policy Impact, Second-Hand Clothing, Tangerang City, Thrift Business

Cronicle of Article:Received (11,12,2025); Revised (15,12,2025); and Published (28,12,2025)

©2025 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Adminitrasi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM

Profile and corresponding author : David Anthonyus adalah Alumni Program Studi Administrasi Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM. Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat 10530, **Corresponding Author,** davidmanihuruk14@gmail.com, suparmansasa19@gmail.com,

How to cite this article : Anthonyus D, Suparman. "Faktor- Faktor Dampak Kebijakan Larangan Import Pada Penjualan Thrift Di Kota Tangerang", *adbispreneur* 5 (6),pp. 537 - 544. Available at:<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMABI>

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antarnegara yang melintasi batas wilayah dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing negara. Menurut Widjaja (2008), perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli yang dilakukan oleh pihak-pihak dari negara berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi, aktivitas perdagangan internasional mengalami peningkatan yang signifikan, terutama melalui kegiatan ekspor dan impor berbagai komoditas,

termasuk produk sandang atau pakaian yang menjadi kebutuhan dasar manusia dan terus berkembang mengikuti tren serta gaya hidup masyarakat.

Dalam perkembangannya, perdagangan pakaian tidak hanya mencakup produk baru, tetapi juga pakaian bekas yang dikenal dengan istilah thrift atau thrifting. Fenomena thrifting mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di kalangan generasi muda yang tertarik pada harga yang lebih terjangkau serta konsep keberlanjutan melalui pemanfaatan kembali barang yang masih layak pakai. Kondisi ini mendorong berkembangnya usaha thrift shop di berbagai daerah, termasuk di Kota Tangerang, baik dalam bentuk toko fisik maupun penjualan berbasis digital melalui media sosial dan marketplace. Meningkatnya tren tersebut juga diiringi dengan meningkatnya peredaran pakaian bekas impor di pasar domestik, sebagaimana ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (2024) yang mencatat adanya peningkatan signifikan volume impor pakaian bekas dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, meningkatnya peredaran pakaian bekas impor menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan perlindungan industri tekstil dalam negeri. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Masuknya pakaian bekas impor dengan harga yang relatif murah dinilai dapat menimbulkan persaingan yang tidak seimbang bagi industri dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 sebagai upaya untuk melindungi industri tekstil nasional, menjaga kualitas barang yang beredar, serta meminimalisir risiko kesehatan dari penggunaan pakaian bekas impor.

Selain penerapan regulasi, pemerintah juga melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal, seperti pemusnahan ribuan bal pakaian bekas di berbagai daerah pada tahun 2023. Meskipun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa praktik perdagangan pakaian bekas impor masih terus berlangsung di berbagai wilayah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan realitas di lapangan. Di satu sisi, kebijakan tersebut bertujuan melindungi industri dalam negeri, namun di sisi lain menimbulkan konsekuensi bagi pelaku usaha thrift yang selama ini bergantung pada pasokan pakaian bekas impor sebagai sumber utama barang dagangan.

Dalam perspektif teori lingkungan eksternal bisnis, kebijakan pemerintah merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi aktivitas usaha, baik sebagai peluang maupun ancaman. Selanjutnya, berdasarkan teori dampak sosial dan ekonomi, suatu kebijakan publik akan menimbulkan konsekuensi yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha, baik dalam bentuk perubahan pendapatan, pola konsumsi, maupun kondisi usaha. Sementara itu, teori adaptasi dan strategi usaha menjelaskan bahwa pelaku usaha akan melakukan berbagai penyesuaian untuk mempertahankan keberlangsungan bisnisnya ketika menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Ketiga perspektif teori tersebut menjadi dasar dalam memahami fenomena dampak kebijakan larangan impor terhadap usaha thrift.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Tangerang yang memiliki aktivitas perdagangan yang cukup tinggi, termasuk dalam sektor thrift. Banyaknya pelaku usaha thrift di wilayah ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas. Namun, dengan adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas, pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan stok barang, perubahan strategi penjualan, serta potensi penurunan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berdampak pada aspek makro ekonomi, tetapi juga pada aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas terhadap penjualan thrift di Kota Tangerang, serta memahami bagaimana kondisi usaha dan strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menghadapi perubahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan kajian ekonomi, khususnya terkait hubungan antara kebijakan publik dan keberlangsungan usaha sektor informal, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih seimbang.

LITERATUR REVIUW.

Kajian Pustaka

1. Administrasi

Menurut Siagian (2001:4) : “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

2. Administrasi Bisnis

Menurut Handayani (2013:4) : “Administrasi Bisnis adalah kegiatan-kegiatan / proses / usaha yang dilakukan dibidang bisnis dalam usahanya mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan.”

3. Import

Menurut Purwito dan Indriani (2015:10): “Impor merupakan kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut yang telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.”

4. Penjualan

Menurut Mulyadi (2016:106) : “Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang dan jasa dengan impian akan mendapatkan laba dari terdapatnya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan bisa diartikan sebagai mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli.”

5. Thrift

Menurut Rizki (2022): “Pengertian thrift yakni produk bekas yang didapatkan secara lokal ataupun impor yang dijual dengan harga murah. Kondisi barang yang didapatkan pun tidak 100% mulus tetapi masih layak untuk diperjual belikan. Bahkan masih banyak barang thrift yang terlihat seperti masih baru.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas terhadap penjualan thrift di Kota Tangerang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata, informasi, serta dokumen yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan kunci serta observasi lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, literatur, serta referensi terkait kebijakan dan aktivitas usaha thrift. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi (triangulasi).

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha thrift dan pihak terkait kebijakan di Kota Tangerang, dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu informan yang memahami, terlibat langsung, dan memiliki informasi relevan terhadap topik penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha thrift, serta akademisi. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep utama, yaitu lingkungan eksternal bisnis (kebijakan larangan impor pakaian bekas), dampak ekonomi, dampak sosial, dampak terhadap usaha thrift, serta respon dan strategi pelaku usaha, yang masing-masing diuraikan ke dalam

indikator seperti pemahaman kebijakan, perubahan pendapatan, daya beli konsumen, persepsi masyarakat, ketersediaan barang, hingga strategi adaptasi usaha.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus hingga diperoleh temuan yang valid. Pengukuran variabel dalam penelitian ini tidak menggunakan skala numerik, melainkan didasarkan pada interpretasi terhadap makna, pola, dan hubungan antar fenomena yang ditemukan di lapangan, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas dipahami oleh seluruh informan sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga ketertiban perdagangan, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri. Meskipun tujuan tersebut dinilai relevan oleh informan dari unsur pemerintah dan akademisi, pelaku usaha thrift lebih banyak memahami kebijakan ini melalui dampak langsung yang mereka rasakan di lapangan, seperti keterbatasan peredaran barang dan penurunan aktivitas penjualan. Dari sisi implementasi, kebijakan ini dinilai belum berjalan optimal karena pengawasan yang belum merata dan sosialisasi yang masih terbatas, terutama kepada pelaku usaha kecil. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan belum maksimal, yang ditunjukkan dengan masih adanya peredaran barang secara terbatas dan pemanfaatan celah dalam sistem distribusi. Selain itu, penerapan sanksi dipandang penting oleh seluruh informan, namun perlu dilakukan secara adil dan konsisten agar tidak menimbulkan ketimpangan, khususnya bagi pedagang kecil.

Dari aspek ekonomi, kebijakan larangan impor pakaian bekas memberikan dampak signifikan terhadap kondisi usaha thrift, terutama dalam bentuk penurunan pendapatan dan ketidakstabilan aktivitas usaha. Keterbatasan pasokan barang menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan tersebut, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga, menurunnya volume penjualan, serta berkurangnya frekuensi transaksi. Kenaikan biaya pengadaan dan logistik turut mempersempit margin keuntungan pelaku usaha, sehingga mereka harus melakukan penyesuaian dalam pengelolaan usaha. Selain itu, terjadi pergeseran aktivitas ekonomi, di mana sebagian pelaku usaha mulai mencari alternatif sumber pendapatan atau mengubah strategi usaha. Daya beli konsumen terhadap produk thrift juga mengalami dinamika, di mana sebagian tetap bertahan karena faktor kebutuhan dan harga yang relatif terjangkau, sementara sebagian lainnya menurun akibat kenaikan harga dan keterbatasan pilihan produk.

Dari aspek sosial, kebijakan ini memunculkan beragam persepsi di masyarakat terhadap pakaian bekas. Di satu sisi, pakaian thrift masih dipandang memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan karena harganya terjangkau, membuka peluang usaha, serta mendukung pengurangan limbah tekstil. Namun di sisi lain, terdapat persepsi negatif yang berkaitan dengan isu kesehatan, kebersihan, dan legalitas produk. Kondisi ini menciptakan sikap masyarakat yang cenderung terbelah antara mendukung dan menolak kebijakan, tergantung pada kepentingan dan pemahaman masing-masing individu. Perubahan perilaku konsumsi juga terlihat, di mana masyarakat menjadi lebih selektif dalam membeli, mulai mempertimbangkan kualitas, harga, serta aspek legalitas, dan sebagian mulai beralih ke produk lokal sebagai alternatif. Meskipun demikian, minat terhadap pakaian thrift masih tetap ada, terutama pada segmen konsumen tertentu.

Dampak kebijakan juga terlihat pada aspek operasional usaha thrift, khususnya dalam hal ketersediaan barang dan biaya operasional. Terhentinya pasokan impor menyebabkan stok barang menjadi terbatas dan variasi produk menurun, yang secara langsung menghambat aktivitas penjualan. Di sisi lain, biaya operasional mengalami peningkatan, terutama pada komponen pengadaan barang dan logistik, sehingga

menekan keuntungan usaha. Kondisi ini meningkatkan risiko usaha, termasuk potensi penurunan omzet hingga kemungkinan penutupan usaha bagi pelaku yang tidak mampu beradaptasi. Keberlangsungan usaha sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan, baik dari segi strategi penjualan, pengelolaan stok, maupun inovasi usaha.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pelaku usaha thrift menunjukkan berbagai bentuk respons dan strategi adaptasi. Adaptasi dilakukan dengan cara lebih selektif dalam memilih barang, mengoptimalkan stok yang tersedia, menekan biaya operasional, serta memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana pemasaran. Selain itu, kerja sama dengan supplier lokal dan diversifikasi produk menjadi alternatif untuk menjaga ketersediaan barang dan keberlangsungan usaha. Meskipun strategi tersebut dinilai cukup membantu mempertahankan usaha, efektivitasnya masih terbatas karena kendala utama seperti keterbatasan modal, pasokan barang yang belum stabil, serta perubahan model bisnis yang harus dilakukan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas membawa dampak multidimensional yang tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan keberlangsungan usaha, sehingga memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak agar tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa mengabaikan kondisi pelaku usaha di lapangan.

Pembahasan

1. Faktor-Faktor Dampak Kebijakan Larangan Impor pada Penjualan Thrift di Kota Tangerang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas memberikan dampak yang kompleks terhadap penjualan thrift di Kota Tangerang. Secara empiris, temuan ini mengonfirmasi bahwa perubahan kebijakan publik memiliki keterkaitan langsung dengan dinamika sektor informal, khususnya usaha thrift yang selama ini bergantung pada rantai pasok global. Dalam perspektif teori dampak kebijakan ekonomi, intervensi pemerintah melalui pembatasan impor akan memengaruhi keseimbangan pasar, terutama pada aspek penawaran.

Keterbatasan pasokan barang yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat teori penawaran, di mana berkurangnya ketersediaan barang akan berdampak pada penurunan volume transaksi. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa dampak tersebut tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, yaitu menurunnya variasi dan kualitas produk thrift. Hal ini menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti penurunan jumlah barang, tanpa menekankan perubahan karakteristik produk sebagai faktor penentu minat beli konsumen.

Dari sisi perilaku konsumen, hasil penelitian ini relevan dengan teori keputusan pembelian yang menekankan pentingnya keberagaman pilihan produk. Penurunan variasi barang thrift terbukti berdampak pada menurunnya minat beli konsumen. Secara empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen thrift tidak hanya sensitif terhadap harga, tetapi juga terhadap nilai unik (*uniqueness value*) dari produk yang ditawarkan. Temuan ini memperkaya kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa daya tarik thrift tidak semata-mata pada harga murah, tetapi juga pada diferensiasi produk.

Selain itu, peningkatan biaya pengadaan yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan teori struktur biaya usaha, di mana kelangkaan input akan meningkatkan biaya produksi atau pengadaan. Namun demikian, kebaruan dari temuan ini terletak pada adanya dilema harga yang dihadapi pedagang, yaitu antara menaikkan harga untuk menjaga margin atau mempertahankan harga untuk menjaga daya beli konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan ganda (*double pressure*) yang jarang dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Dalam konteks persaingan usaha, hasil penelitian ini mendukung teori persaingan pasar yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya akan meningkatkan intensitas kompetisi. Akan tetapi, secara empiris ditemukan bahwa persaingan tidak berlangsung secara seimbang, melainkan cenderung

menguntungkan pelaku usaha dengan modal dan jaringan yang lebih kuat. Hal ini memperkuat sekaligus memperluas teori dengan menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam persaingan usaha thrift.

Lebih lanjut, aspek ketidakpastian usaha yang ditemukan dalam penelitian ini relevan dengan teori risiko usaha. Perubahan kebijakan tanpa diikuti dengan alternatif solusi menyebabkan meningkatnya ketidakpastian dalam perencanaan usaha. Kebaruan dari temuan ini terletak pada fakta bahwa ketidakpastian tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi perilaku pengambilan keputusan pelaku usaha, seperti kecenderungan menahan ekspansi dan mengurangi aktivitas usaha.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa dampak kebijakan larangan impor tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional, mencakup aspek pasokan, perilaku konsumen, biaya usaha, persaingan, dan ketidakpastian. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut dalam konteks usaha thrift, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu.

2. Kondisi Usaha dan Pendapatan Penjual Thrift di Kota Tangerang Setelah Kebijakan Diterapkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas berdampak nyata terhadap kondisi usaha dan pendapatan penjual thrift di Kota Tangerang. Secara teoritis, temuan ini selaras dengan konsep keberlangsungan UMKM yang menyatakan bahwa stabilitas usaha sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk kebijakan pemerintah.

Penurunan pendapatan yang dialami pedagang thrift menguatkan teori pendapatan usaha kecil yang bergantung pada keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa penurunan pendapatan tidak terjadi secara langsung, melainkan berlangsung secara bertahap seiring menipisnya stok barang. Temuan ini menjadi kebaruan karena menunjukkan adanya pola dampak bertahap (*gradual impact*), yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya.

Selain itu, ketidakstabilan arus kas yang dialami pelaku usaha memperkuat teori manajemen keuangan UMKM, di mana arus kas merupakan indikator utama kesehatan usaha. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan arus kas tidak hanya disebabkan oleh penurunan pendapatan, tetapi juga oleh ketidakpastian pasokan barang. Hal ini menunjukkan adanya hubungan simultan antara aspek operasional dan finansial dalam usaha thrift.

Dari sisi skala usaha, temuan penelitian ini sejalan dengan teori penyesuaian kapasitas usaha, di mana pelaku usaha cenderung menurunkan skala operasional ketika menghadapi tekanan eksternal. Akan tetapi, secara empiris ditemukan bahwa penurunan skala usaha tidak hanya sebagai bentuk efisiensi, tetapi juga sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*). Temuan ini memberikan kontribusi baru dalam memahami perilaku adaptif UMKM.

Peningkatan biaya pengadaan yang terjadi juga relevan dengan teori struktur biaya, di mana kenaikan biaya input akan menekan margin keuntungan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fakta bahwa peningkatan biaya terjadi bersamaan dengan penurunan pendapatan, sehingga menciptakan tekanan ekonomi ganda yang mempercepat penurunan kinerja usaha.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya perbedaan daya tahan antara pedagang skala kecil dan menengah. Temuan ini mendukung teori ketimpangan dampak kebijakan, namun sekaligus memperjelas bahwa faktor modal menjadi variabel kunci dalam menentukan kemampuan bertahan usaha. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat teori daya tahan finansial UMKM.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor tidak hanya berdampak pada aspek penjualan, tetapi juga pada stabilitas usaha, struktur biaya, dan keberlangsungan ekonomi pelaku usaha thrift. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi pola dampak bertahap dan tekanan ekonomi ganda yang dialami pelaku usaha.

3. Respon dan Strategi Penjualan Pedagang Thrift di Kota Tangerang dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Impor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang thrift di Kota Tangerang melakukan berbagai bentuk adaptasi dalam merespons kebijakan larangan impor pakaian bekas. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep adaptasi UMKM yang menyatakan bahwa pelaku usaha akan menyesuaikan strategi bisnisnya ketika menghadapi perubahan lingkungan eksternal.

Pada tahap awal, respon yang bersifat reaktif mencerminkan adanya ketidakpastian dan keterbatasan informasi. Hal ini sesuai dengan teori perilaku organisasi kecil yang menyatakan bahwa UMKM cenderung mengalami shock ketika terjadi perubahan kebijakan yang signifikan. Namun, seiring waktu, pedagang mulai menunjukkan pola adaptasi yang lebih terstruktur.

Strategi pengelolaan stok yang lebih selektif menunjukkan penerapan prinsip efisiensi dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Temuan ini relevan dengan teori manajemen persediaan, namun memiliki kebaruan pada konteks thrift, di mana seleksi tidak hanya berdasarkan kuantitas, tetapi juga pada tren dan preferensi pasar.

Penyesuaian strategi harga juga mencerminkan fleksibilitas pelaku usaha dalam menghadapi tekanan biaya. Dalam teori penetapan harga UMKM, fleksibilitas merupakan faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan dan daya beli konsumen. Secara empiris, penelitian ini menemukan adanya dua pola strategi harga, yaitu menaikkan harga dan menekan margin, yang menunjukkan adanya diferensiasi strategi antar pelaku usaha.

Dalam aspek pemasaran, peningkatan penggunaan media digital memperkuat teori digitalisasi UMKM. Namun, kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fungsi media sosial, yang tidak hanya sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai sarana utama transaksi melalui fitur live selling. Hal ini menunjukkan adanya transformasi model bisnis thrift dari konvensional ke digital.

Diversifikasi produk dan sumber pasokan juga menjadi strategi penting yang ditemukan dalam penelitian ini. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan strategi diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko. Namun, secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi dilakukan secara terbatas dan masih dalam tahap eksplorasi, sehingga belum sepenuhnya mampu menggantikan peran pasokan impor.

Selain itu, perubahan pola hubungan dengan konsumen menunjukkan pentingnya aspek sosial dalam keberlangsungan usaha thrift. Temuan ini mendukung teori hubungan pelanggan, namun juga menegaskan bahwa kepercayaan dan komunikasi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah keterbatasan produk.

Secara keseluruhan, strategi yang dilakukan pedagang thrift masih berfokus pada upaya bertahan (*survival strategy*), bukan ekspansi. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi bahwa adaptasi yang dilakukan bersifat jangka pendek dan belum terintegrasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih komprehensif agar pelaku usaha thrift dapat berkembang secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas terhadap penjualan thrift di Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi yang saling berkaitan dalam aspek ekonomi, sosial, dan keberlangsungan usaha. Dari sisi ekonomi, keterbatasan pasokan barang impor berdampak langsung pada penurunan omzet dan ketidakstabilan pendapatan pelaku usaha thrift, yang juga diikuti oleh kenaikan biaya pengadaan serta penyesuaian harga jual, sehingga memengaruhi daya beli konsumen dan volume penjualan. Dari sisi sosial, kebijakan ini memunculkan beragam persepsi masyarakat terhadap pakaian

bekas, baik sebagai alternatif konsumsi yang ekonomis maupun sebagai produk yang masih dipertimbangkan dari aspek kebersihan dan kualitas, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku konsumsi dan minat beli. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pelaku usaha thrift menunjukkan berbagai bentuk respons adaptif seperti pengelolaan stok yang lebih selektif, efisiensi biaya operasional, pemanfaatan media digital sebagai sarana pemasaran, serta menjalin kerja sama dengan pemasok lokal dan melakukan diversifikasi produk guna menjaga keberlangsungan usaha. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan larangan impor pakaian bekas bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan publik, implementasinya memberikan tekanan yang cukup signifikan bagi pelaku usaha thrift, sehingga diperlukan upaya penyesuaian dan dukungan yang tepat agar keseimbangan antara kebijakan dan keberlangsungan usaha kecil tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2018). Manajemen pemasaran (7th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta.
- Hamdi, M. (2014). Kebijakan publik: Proses, analisis, dan partisipasi. Ghalia Indonesia.
- Handyaningrat, S. (2013). Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). Sistem akuntansi. Salemba Empat.
- Purwito, A., & Indriani. (2015). Ekspor impor sistem harmonis dan pajak dalam kepabeanan. Graha Ilmu.
- Rizki, A. (2022). Pengertian thrift dan karakteristiknya.
- Siagian, S. P. (2001). Manajemen sumber daya manusia. Bumi Aksara. Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suharno. (2013). Dasar-dasar kebijakan publik. Ombak.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2008). Transaksi bisnis internasional. RajaGrafindo Persada.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). Strategic management and business policy: Toward global sustainability (13th ed.). Pearson Education.